

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Syandi Yusra Utama¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.¹,
Drs.Suparman Khan,M.Hum¹**

**¹Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana,Universitas Bung
Hatta**

**¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hata
Email: sandijuniorvusra@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Perubahan atas Peraturan Barang Milik Daerah tersebut merupakan Aset Negara pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambahan dalam pengaset. Permasalahannya yaitu 1) Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah berupa aset di Kabupaten Pasaman Barat 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghapusan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode pendekatan menggunakan penelitian hukum sosiologis yang didasarkan data primer.Sifat penelitian ini adalah deskriptif.Teknik data melalui wawancara dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atas usulan (SKPD) yang diusulkan oleh Pembantu Pengelola Barang tersebut akan mendapat persetujuan disposisi kepanitiaan dari Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Dari disposisi tersebut maka dapat dilakukan rapat kepanitiaan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.2).kendala dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut. Masalah muncul apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah berganti pengurus, maka sangat dimungkinkan terjadinya suatu kerancuan atau ambigu terhadap barang yang akan dihapus. 3) Upaya BPKAD untuk Melakukan sosialisasi kepada SKPD dalam melaksanakan penghapusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

**Kata Kunci : Penghapusan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah**